

PERTARUHAN BERAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh : Tim Riset Stabilitas LPPI

Pertumbuhan kuartal kedua 2021 yang mencapai angka positif sebesar 7,07 persen secara tahunan, menunjukkan bahwa tren pemulihan ekonomi terus berjalan. Capaian ini juga menjadi sinyal awal keluarnya Indonesia dari resesi. Namun demikian, tren perbaikan ini dibarengi dengan tugas berat pemerintah guna memastikan tidak ada sektor ekonomi yang tertinggal, terutama sektor keuangan sebagai jantung perekonomian nasional.

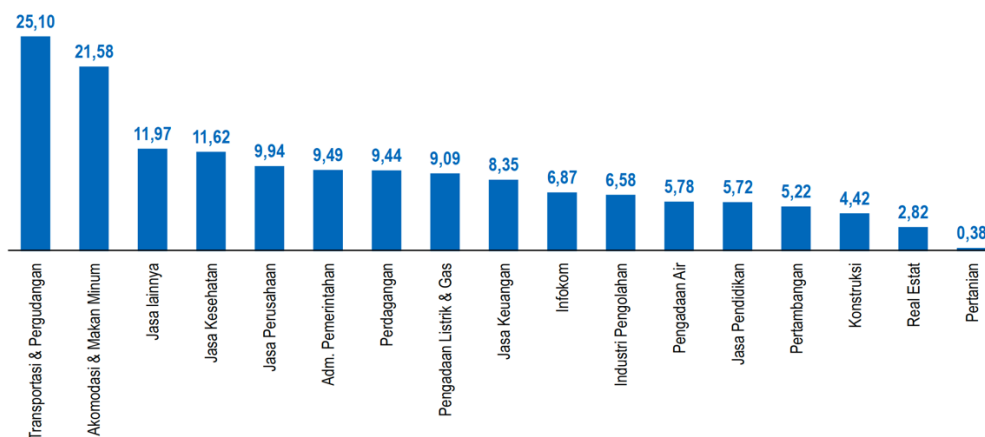
Pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai tampak direspons pemerintah dengan konfigurasi anggaran Negara yang mulai meninggalkan prioritasnya pada kesehatan. Lalu apa risiko dari kebijakan itu?

TREN PERBAIKAN

Pada kuartal kedua lalu, sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhanterendah adalah sektor pertanian dengan pertumbuhan 0,38 persen (yoy). Kemudian dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen.

Pertumbuhan tinggi di sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan menunjukkan dua hal : pertama mobilitas penduduk, barang dan jasa meningkat. Kedua, hal itu menunjukkan adanya perputaran input dan output barang di sistem pergudangan nasional. Kemudian pertumbuhan pada sektor ekspor barang dan jasa memberikan petunjuk pulihnya permintaan dunia terhadap barang dan jasa dari Indonesia.

Gambar 1
Pertumbuhan Sektoral Kuartal II 2021 (YoY, Persen)



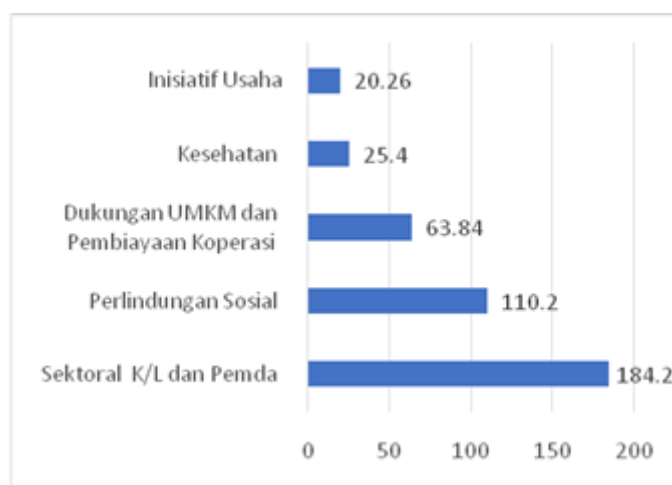
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Tren perbaikan juga ditunjukkan oleh Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia triwulan kedua ini yang menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia sebesar 51,45 persen, meningkat dari 50,01persen pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI-BI pada triwulan kedua terjadi pada mayoritas komponen, terutama komponen Volume Produksi dan Volume Total Pesanan yang tercatat berada pada fase ekspansi. Meningkatnya PMI-BI pada triwulan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas dan permintaan masyarakat saat Ramadan dan hari raya Idul Fitri serta didukung kelancaran dan ketersediaan sarana produksi

Tren perbaikan juga disambut dengan respons kebijakan fiskal yang memotong anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Pada Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara 2022 (RAPBN 2022), Pemerintah memangkas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebesar pada RAPN 2022. Besaran penurunan tersebut Rp422 triliun, dari Rp744 triliun di 2021 menjadi Rp321,2 triliun di 2022. Kementerian Keuangan mencatat, anggaran PEN 2022 tetap akan paling banyak mengalir pada kluster kesehatan dan perlindungan sosial

Gambar 2
Alokasi PEN 2021 (Rp Triliun)



Sumber : Kementerian Keuangan, 2021

Apa yang melandasi langkah berani pemerintah tersebut? Jawabannya adalah pemulihan ekonomi yang dianggap sudah berada pada jalurnya dan capaian vaksinasi nasional. Per tanggal 21 Agustus 2021, capaian vaksinasi di Indonesia mencapai angka 56,5 juta orang yang sudah menerima dosis pertama atau sekitar 23,3 persen dari target. Sedangkan penduduk yang sudah menerima dua suntikan vaksin mencapai 30,7 juta orang atau sekitar 12,7 persen dari target.

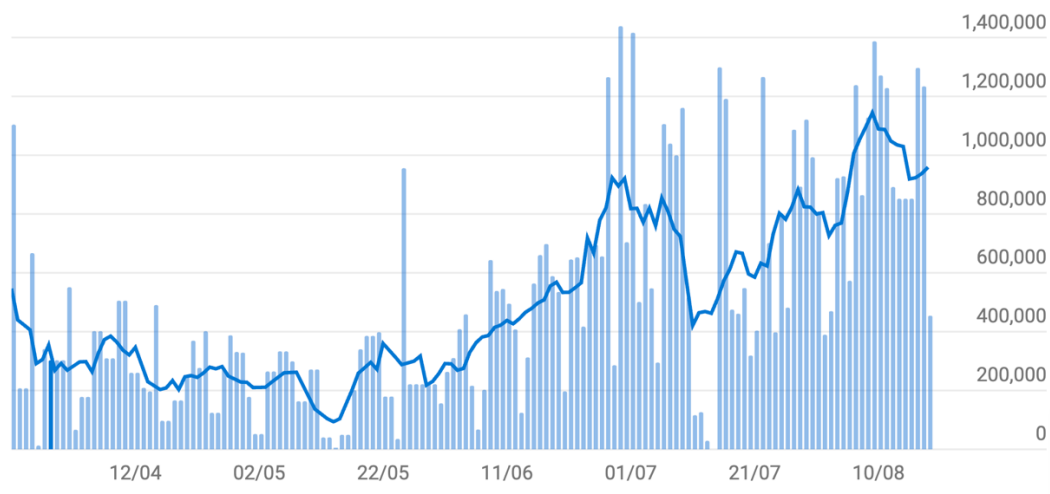
Capaian ini tidak lepas dari besaran vaksinasi harian yang sudah diatas 500 ribu per hari sejak 2 Agustus 2021. Lebih lanjut, pada bulan Agustus 2021, terdapat beberapa hari yang capaian vaksinnnya mencapai 1 juta dosis. Angka tersebut merupakan angka yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi.

Apabila dalam empat bulan terakhir capaian vaksinasi per hari adalah 1 juta, maka hingga akhir



2021, akan ada tambahan 130 juta orang yang tervaksin untuk suntikan pertama, dengan asumsi dari tanggal 22 Agustus hingga 31 Agustus 2021 capaian vaksin harian mencapai 1 juta orang. Hal ini berarti pada akhir Desember sudah ada 185 juta orang yang sudah mendapat vaksin dosis pertama. Artinya, sudah tercapai 68 persen penduduk yang tervaksin. Dengan demikian, pada Januari 2022 diperkirakan sudah ada 70 persen penduduk yang tervaksin suntikan pertama.

Gambar 3
Proses Perkembangan Vaksinasi Indonesia



Sumber : Vaksin Dashboard, www.kemkes.go.id

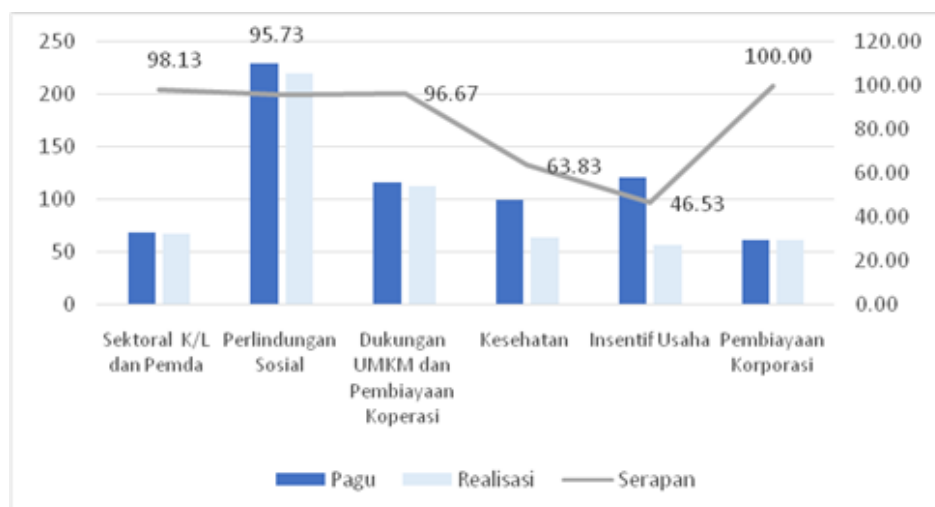
Meski capaian vaksinasi diperkirakan sudah mencapai 70 persen untuk dosis pertama pada Januari 2022, namun ada PR besar yang harus diperhatikan oleh pemerintah yakni recovery sektor riil. Pentingnya perbaikan sektor riil penting agar nafas sektor keuangan juga semakin membaik. Dengan demikian, pertengahan kedua tahun ini menjadi taruhan pemerintah dalam mengawali perbaikan ekonomi nasional.

JANGAN ADA YANG TERTINGGAL

Pemotongan PEN pada RAPBN 2022 harus diawali dengan pra kondisi yang baik di kuartal ketiga dan keempat. Syarat pra kondisi yang mutlak adalah capaian vaksin yang harus mencapai setidaknya 70 persen masyarakat. Namun hal ini sepertinya akan sulit dicapai hingga akhir tahun 2021, seperti yang dijelaskan pada awalan tulisan ini. Jika asumsi 1 juta per hari vaksinasi tercapai hingga akhir tahun 2021, maka pada akhir tahun baru tercapai 68 persen masyarakat dengan suntikan pertama.

Prakondisi berikutnya adalah penyerapan PEN 2021 harus optimal, sesuai target dan terserap 100 persen. Jangan sampai penyerapan PEN 2021 tidak jauh berbeda dengan PEN 2020 yang hanya sebesar 83,4 persen. Per 31 Desember 2020, hanya terealisasi Rp579,78 triliun total pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Gambar 4
Penyerapan PEN 2020



Sumber : Kementerian Keuangan, 2021

Realisasi PEN 2020 sebesar Rp579,78 triliun meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun (serapan 63,38 persen), perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun (serapan 95,73 persen), sektoral K/L dan Pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun (serapan 98,13 persen). Kemudian juga UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun (96,67 persen), pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun (100 persen), serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.

Berdasarkan pengalaman penyerapan PEN 2020 bisa disimpulkan bahwa penyerapan secara total belum maksimal. Apabila ditelisik lebih detail, penyerapan anggaran PEN 2020 untuk korporasi lebih mudah terserap dibandingkan dengan anggaran PEN untuk UMKM dan koperasi serta sektor lain semisal Kesehatan.

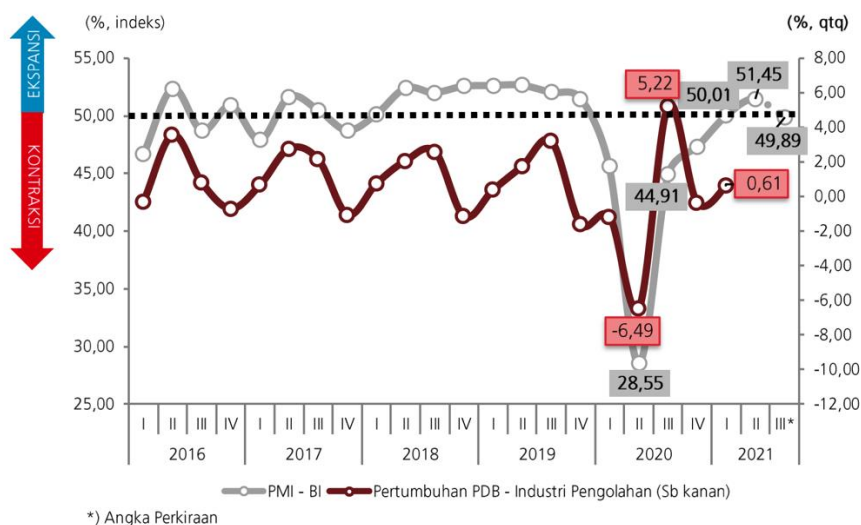
Lebih lanjut, kuartal ketiga diprediksi tidak sebaik kuartal kedua lalu. Data PMI-Bank Indonesia menyebutkan pada triwulan ketiga, kinerja sektor Industri Pengolahan diperkirakan berkontraksi. PMI-BI triwulan ketiga 2021 diperkirakan sebesar 49,89persen, turun dari 51,45persen pada triwulan sebelumnya.

Penurunan indeks PMI disebabkan oleh kontraksi pembentuk indeksinya. Semua komponen pembentuk indeks mengalami kontraksi mulai dari volume produksi, volume pesanan barang input, volume persediaan barang dan penggunaan tenaga kerja. Pada komponen kecepatan penerimaan barang input, masih akan pada fase kontraksi dengan perbaikan.

Pada triwulan ketiga, volume Produksi diperkirakan turun dan berada dalam fase kontraksi dengan indeks sebesar 47,17persen sejalan dengan kebijakan pembatasan mobilitas dalam rangka pengendalian Covid-19. Sedangkan untuk volume pesanan barang input diperkirakan akan melambat dengan indeks sebesar 53,52persen meski masih dalam fase ekspansi. Perlambatan tersebut terjadi pada berbagai subsektor, antara lain Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki, Kertas & Barang dari Cetakan, Pupuk, Kimia & Barang dari Karet serta Logam Dasar Besi dan Baja.



Gambar 5
Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia



Sumber : Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia, 2021

Sedangkan pada komponen volume persediaan barang jadi diprakirakan turun dan berada pada fase kontraksi dengan indeks 49,91 persen seiring dengan penurunan volume produksi. Pada komponen penggunaan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan diprakirakan melambat sejalan dengan penurunan volume produksi dengan indeks sebesar 47,51 persen. Penurunan tersebut diprakirakan karena sejumlah industri di Jawa dan Bali mengikuti kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat pada bulan Juli 2021 serta masih waitandsee pada triwulan ketiga tahun ini. Komponen Kecepatan Penerimaan Barang Input pada triwulan kedua 2021 meningkat meski masih dalam fase kontraksi, dengan indeks sebesar 46,57 persen. Perbaikan Kecepatan Penerimaan Barang input diindikasikan didorong oleh kelancaran distribusi dan pasokan semakin baik. Pada triwulan ketiga, diindikasikan membaik dengan indeks sebesar 50,34 persen.

Gambaran perkembangan ekonomi kuartal kedua dan perkiraan kinerja kuartal ketiga memberi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi kuartal kedua lalu. Hal ini juga sejalan dengan sejarah perkembangan pertumbuhan ekonomi triwulanan yang tinggi ketika hari besar keagamaan nasional dalam hal ini Idul Fitri. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena 55 persen pembentuk ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi.

Hal tersebut berimplikasi bahwa kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini pemerintah harus memastikan penyaluran PEN hingga akhir tahun harus optimal dan dipastikan terserap 100 persen. Terutama insentif untuk industri, UMKM dan koperasi. Selain itu penting untuk diupayakan agar alokasi PEN untuk bantuan sosial tetap berjalan dengan baik dan optimal. Bantuan sosial yang tepat sasaran, optimal, tepat waktu dan tepat jumlah merupakan salah satu syarat untuk menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil. Membaiknya ekonomi, akan berdampak pada longgarnya nafas sektor keuangan.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>
 Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :
 Divisi Corporate Secretary
 Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: dcsc@lppi.or.id
 Website : www.lppi.or.id

Disclaimer:

Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

